

Analisis Framing Pemberitaan Politik Dinasti Jokowi Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Media Online Kompas.com dan Okezone.com

Abdul Aziz, Umaimah Wahid

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur

Alamat Email : abdulazizrawabelong@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media *online* kompas.com dan okezone.com dalam membingkai berita tentang politik dinasti pada Pilkada 2020. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penulis menggunakan model analisis framing dari Robert N. Entmant. Objek penelitian ini adalah berita menyangkut politik dinasti Presiden Jokowi, di media *online* kompas.com dan okezone.com. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Hasil analisis penelitian ini menampilkan pemberitaan tentang politik dinasti pada Pilkada tahun 2020. Dalam hasil analisis framing berita menggunakan model Robert N. Entman, ada beberapa tahapan seperti definisi masalah, perkiraan masalah dari sumber masalah, pembuatan keputusan moral, dan penyelesaian masalah. Pemberitaan pada kompas.com secara jelas menonjolkan berita yang kontra atau tidak setuju dengan adanya politik dinasti yang ada di Indonesia, khususnya pada Pilkada 2020 ini, sedangkan pemberitaan pada okezone.com secara jelas tidak mempermasalahkan adanya politik dinasti pada Pilkada 2020 ini.

Kata Kunci: politik dinasti, Pilkada 2020, media online, analisis framing.

Framing Analysis of Political Statement of Jokowi Dynasty in The Election of Constitutional Regional Heads in 2020 in Kompas.com and Okezone.com Online Media

ABSTRACT

This study aims to determine how online media of kompas.com and okezone.com in framing news about dynastic politics in the 2020 Pilkada. To achieve this goal, this study uses a qualitative research method, where the author uses the framing analysis model of Robert N. Entmant. The object of this research is news regarding the politics of President Jokowi's dynasty, in online media kompas.com and okezone.com. The data collection technique used literature study. The results of the analysis of this study present news about dynastic politics in the 2020 Pilkada. In the results of the news framing analysis using the Robert N. Entman model, there are several stages such as problem definition, problem estimation from problem sources, moral decision making, and problem solving. The news on kompas.com clearly highlighted news that was contra or disagreeable with the existence of dynastic politics in Indonesia, especially in the 2020 Pilkada, while the news on okezone.com clearly did not question the existence of dynastic politics in the 2020 Pilkada.

Keywords: dynastic Politics, 2020 Pilkada, online media, framing analysis.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilangsungkan Pada Rabu, 9 Desember Tahun 2020 ini cukup menarik perhatian dengan beberapa kandidat muncul dari keluarga orang nomor satu Indonesia, Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi. Putra Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai wali kota di Solo, dan menantu laki-laki Jokowi, Bobby Nasution yang mencalonkan diri sebagai wali kota Medan. Dengan kemenangan dari Putra dan menantu Jokowi pada Pilkada Tahun 2020 ini Keluarga Jokowi akan bergabung dengan dinasti politik lain yang sudah ada dalam perebutan kekuasaan dan sumber daya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Fenomena politik dinasti merupakan salah satu yang perlu di apresiasi oleh berbagai

kalangan untuk pembahasan prospek kedepannya, dan media menjadi sarana konstruksi dan publikasi guna terbangunnya opini publik dan pembahasan publik atas fenomena politik dinasti tersebut sehingga memunculkan gambaran solusi yang diharapkan semua pihak. Walaupun secara undang-undang tidak ada syarat atau ketentuan yang melarang kerabat dari Pemerintah atau pun Aparatur Negara untuk mencalonkan diri menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tetapi ada sebuah etika politik yang harus menjadi pertimbangan dari fenomena politik dinasti tersebut.

Objek penelitian ini ialah berita menyangkut politik dinasti Presiden Joko Widodo, di media online *kompas.com* dan *okezone.com*. Ada dua alasan yang menjadi pertimbangan pemilihan dua media tersebut, yaitu: pertama, media online *kompas.com* dan *okezone.com* merupakan media pemberitaan yang bersifat nasional. Media tersebut memiliki komunitas pembaca yang sangat luas baik dari aspek keluasan wilayah maupun segmentasi audiensnya. Kedua, media online tersebut mendukung tereksposnya fenomena politik dinasti dalam pemberitaan di media.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Konstruksi Realitas Sosial

Teori konstruksi realitas memiliki tiga proses tahapan yaitu eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi. Pada tahap

eksternalisasi seseorang akan menyesuaikan diri baik secara fisik maupun mental. Pada tahap ini seseorang akan menyesuaikan diri dengan dunia sosiokultural yang merupakan produk dari manusia itu sendiri. Proses selanjutnya yaitu objektivikasi pada tahap ini seseorang telah dapat mengekspresikan dirinya kedalam hubungan sosial masyarakat.

Dalam tahap objektivikasi, seseorang mulai berinteraksi dalam dunia yang intersubjektif. Dan pada tahap internalisasi seseorang akan mengalami kesadaran sehingga subyektifitasnya dipengaruhi oleh konstruksi sosial disekitarnya. Ketiga tahapan proses tersebut akan selalu ada pada diri seseorang sampai pada akhirnya ia memahami sebuah realitas yang dikonstruksinya (Pratiwi, 2018).

Melihat latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti berita-berita yang berkembang mengenai politik dinasti Presiden Jokowi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 ini. Untuk itu peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Analisis Framing Pemberitaan Politik Dinasti Jokowi Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Media Online Kompas.com dan Okezone.com”.

Dan dari rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini bertujuan: ”Untuk mengetahui bagaimana analisis framing pemberitaan politik dinasti Jokowi pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 9 Desember 2020 di media online kompas.com dan okezone.com”, dengan menggunakan

analisis framing dengan pendekatan dari Robert N. Entman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penulis menggunakan model analisis framing dari Robert N. Entmant. Hasil dari penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan dan meringkaskan berbagai kondisi atau berbagai variabel yang timbul pada media massa yang menjadi objek penelitian pemberitaan pemberitaan politik dinasti Presiden Jokowi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020 di media online kompas.com dan okezone.com.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis framing dari Robert N. Entman yang merujuk pada pemberian definisi, penjelasan dan evaluasi serta rekomendasi dalam suatu peristiwa yang diwacanakan (Santosa, 2016).

Fokus penelitian ini adalah dimaksudkan untuk membatasi studi, sehingga dengan pembatasan studi tersebut akan memudahkan penulis dalam pengelolaan data yang kemudian menjadi suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini pengumpulan sumber data yang dianggap relevan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa framing Model Robert N. Entman Pemberitaan kompas.com “Pilkada 2020 di Mata Media Asing, Dinasti Politik Jokowi Jadi Sorotan”, 9 Desember 2020.

Pemberitaan Pada Kompas.com

KOMPAS.com - Pilkada 2020 cukup menarik perhatian dengan beberapa kandidat muncul dari keluarga orang nomor satu Indonesia, Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi. Indonesia pada Rabu (9/12/2020) melangsungkan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan lebih dari 100 juta orang berhak memilih pemimpin politik di 270 wilayah. Pilkada ini untuk menentukan gubernur di 9 dari 34 provinsi, bupati di 224 dari 416 kabupaten, dan wali kota di 37 dari 98 kota. Putra pertama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai wali kota di Solo.

Jika dikonfirmasi menang, Gibran akan menjadi wali kota Solo pada Februari mendatang. Beberapa media asing menyoroti pilkada di Indonesia tahun ini sebagai politik dinasti baru yang akan lahir. Baik Gibran maupun Bobby, keduanya adalah pendatang baru di dunia politik Indonesia. Namun, mereka telah mendapat dukungan partai politik besar, di mana Jokowi berada, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sekalipun melawan kader-kader menjanjikan lainnya yang telah berkiprah di PDI-P lebih lama. “Jika mereka hanya warga negara atau

politikus biasa, mereka tidak akan mendapatkan tiket itu dengan mudah,” kata Abdil Mughis Mudhoffir, seorang peneliti post-doktoral di Institut Asia Universitas Melbourne, seperti dilansir Bloomberg pada Selasa (8/12/2020).

“Keluarga Jokowi akan bergabung dengan klub dinasti politik lain yang ada dalam perebutan kekuasaan dan sumber daya,” lanjut Mudhoffir. “Politik Indonesia akan tetap sama, atau bahkan memburuk karena dinasti dan nepotisme akan menjadi normal baru,” terangnya.

Para kritikus kini mempertanyakan apakah Jokowi sedang mencoba membangun dinasti politiknya sendiri, dilansir dari Nikkei Asia pada Rabu (9/12/2020). Sementara itu, dinasti politik adalah sebuah gagasan yang ingin Jokowi hindari dengan menjauhkan diri dari ambisi politik putra dan menantunya, melalui penyangkalan klaim apa pun tentang dinasti politik keluarganya itu. Melansir Bloomberg, Gibran sempat menanggapi isu soal dinasti yang sedang tumbuh, dengan mengatakan dia tidak menjamin kemenangan pemilihan. “Ini kontes, bukan janji,” katanya setelah pencalonannya diumumkan pada Juli.

“Dinasti politik semakin terbukti sebagai indikator di mana ruang untuk bersaing, meski masih luas, tapi semakin menyempit,” imbuh sebagaimana yang dilansir dari Al Jazeera. Aisah Putri Budiatri, Peneliti Pusat Kajian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan pemilu tahun ini menunjukkan “kegagalan

parpol dalam merekrut calon kepala daerah berdasarkan kader internal partai”. “Banyak dari kandidat berbasis kekerabatan ini bukanlah politisi berpengalaman di bidang pencalonan dan belum membangun jaringan yang mengakar, baik di dalam partai atau dengan komunitas di daerah pemilihan mereka,” katanya kepada Al Jazeera. Melansir Inter Press Service pada Selasa (8/12/2020), sarjana komunikasi politik dari Universitas

Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, berkata, “Prinsip meritokrasi dengan aspek kelayakan dan kompetensi merupakan syarat mutlak untuk mendukung kualitas seorang calon.” Sementara, dosen Komisioner Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menegaskan bahwa pengembangan kader partai itu penting. “Beri waktu setidaknya 10 tahun sebelum kader partai menjadi calon eksekutif atau legislatif,” ujar Emrus.

Pemberitaan pada kompas.com secara jelas menonjolkan berita yang kontra atau tidak setuju adanya politik dinasti yang ada di Indonesia, khususnya pada Pilkada 2020 ini. Terbukti dari pernyataan dari beberapa narasumber yang diwawancarai terhadap pemberitaan tentang politik dinasti pada Pilkada 2020, salah satunya adalah Abdil Mughis Mudhoffir, seorang peneliti post-doktoral di Institut Asia Universitas Melbourne. Menurutnya “Keluarga Jokowi akan bergabung dengan klub dinasti politik lain yang ada dalam perebutan kekuasaan dan sumber daya”, “Politik Indonesia akan tetap sama, atau bahkan memburuk karena dinasti dan nepotisme akan menjadi normal baru”.

II. Analisa framing Model Robert N. Entman Pemberitaan okezone.com “Pandemi, Golput dan Dinasti Politik Baru Warnai Pilkada 2020”, 11 Desember 2020.

Pemberitaan Pada Okezone.com

JAKARTA - Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak hari Rabu 9 Desember 2020 yang dilangsungkan di tengah masih terus meluasnya perebakan pandemi virus corona membuat pelaksanaannya berbeda dengan pilkada di tahun-tahun sebelumnya. Sejak awal Ketua KPU Arief Budiman sudah menegaskan keharusan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat mengingat sebagian daerah masuk kategori zona merah dan berisiko tinggi terjadinya penularan Covid-19. Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, ada 24 daerah penyelenggaraan pilkada yang berstatus zona merah dan 189 daerah masuk kategori berisiko sedang terhadap penularan virus.

“Belum ada hal luar biasa yang dilaporkan terkait kendala logistik. Juga SDM, terutama KPPS karena dibutuhkan petugas yang lebih banyak. Memang beberapa dilaporkan hasil tes-nya reaktif. Saya sudah minta pada KPU Kabupaten/Kota memperhatikan betul protokol kesehatan ini.

Kalau mereka tidak bebas dari virus Covid-19 maka saya minta mereka (petugas.red) diganti,” kata Arief Budiman. KPU menyelenggarakan pilkada serentak di 270 daerah untuk memilih gubernur di sembilan dari 34 propinsi, bupati di 224 dari 416 kabupaten dan walikota di 37 dari 98 kota. Diperkirakan ada lebih dari 100 juta warga yang memiliki hak suara. Tetapi sejumlah kota melaporkan jumlah pemilih kurang dari separuh yang terdaftar. Tingginya jumlah warga yang tidak memberikan suara atau dikenal sebagai golput ini memang sudah diperkirakan sebelumnya, tidak saja karena kekhawatiran warga akan perebakan pandemi, tetapi juga sedikitnya pilihan tokoh yang dapat dipilih.

Dinasti Politik Baru

Pilkada 2020 ini juga memunculkan dinasti politik baru dengan keikutsertaan beberapa anggota keluarga orang nomor satu dan nomor dua Indonesia, juga keponakan para mantan pemimpin. Sebut saja putra pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang mencalonkan diri sebagai walikota Solo dan menantu laki-laki Jokowi, Bobby Nasution yang mencalonkan diri sebagai walikota Medan. Penghitungan suara cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei menunjukkan Gibran dan Bobby, yang sama-sama pendatang baru di dunia politik namun didukung partai politik besar, memperoleh hampir 90% suara dalam pemilihan hari Rabu.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam pernyataan tertulisnya mengatakan kemenangan kedua calon PDI-Perjuangan itu merupakan bagian dari komitmen Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk memastikan partai pimpinannya menghasilkan kepemimpinan muda berkualitas. "Kemenangan ini adalah bukti kedaulatan rakyat dalam melihat sosok calon pemimpin daerah. Keduanya menunjukkan semangat dan komitmen yang serius dan teguh, walau banyak upaya menghambat. Misalnya lewat kampanye negatif terkait politik dinasti," tukas Hasto. Proses penghitungan suara dan rekapitulasi diperkirakan akan berlangsung hingga 17 Desember, yang diikuti dengan pengumuman dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota antara 13-23 Desember, dan tingkat propinsi antara 16-20 Desember. Penetapan dijadwalkan lima hari setelah rekapitulasi penghitungan suara selesai. Pemberitaan pada okezone.com secara jelas tidak mempermasalahkan adanya politik dinasti pada Pilkada 2020 ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis mencoba membahas mengenai "Analisis Framing Pemberitaan Politik Dinasti Jokowi Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 9 Desember 2020 Di Media Online Kompas.com dan Okezone.com", bahwa berbagai opini publik tentang pemberitaan media massa yang mengungkap isu politik dinasti di lingkup pemerintahan di setiap Pemilihan Umum Kepala Daerah

(Pemilukada) selalu ramai dan menjadi pemberitaan nasional di berbagai media massa. Belum ada aturan atau undang-undang yang membatasi keberadaannya, maka opini menyatakan sah saja adanya politik dinasti dalam jaringan pemerintahan.

Pemberitaan pada kompas.com secara jelas menonjolkan berita yang kontra atau tidak setuju adanya politik dinasti yang ada di Indonesia, khususnya pada Pilkada 2020 ini. Terbukti dari pernyataan dari beberapa narasumber yang diwawancarai terhadap pemberitaan tentang politik dinasti pada Pilkada 2020, salah satunya adalah Abdil Mughis Mudhoffir, seorang peneliti post-doktoral di Institut Asia Universitas Melbourne. Menurutnya “Keluarga Jokowi akan bergabung dengan klub dinasti politik lain yang ada dalam perebutan kekuasaan dan sumber daya”, “Politik Indonesia akan tetap sama, atau bahkan memburuk karena dinasti dan nepotisme akan menjadi normal baru”.

Pemberitaan pada okezone.com secara jelas tidak mempermasalahkan adanya politik dinasti pada Pilkada 2020 ini. Terbukti dari pernyataan dari Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam pernyataan tertulisnya mengatakan kemenangan kedua calon PDI-Perjuangan itu merupakan bagian dari komitmen Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk memastikan partai pimpinannya menghasilkan kepemimpinan muda berkualitas. "Kemenangan ini adalah bukti kedaulatan rakyat dalam melihat sosok

calon pemimpin daerah. Keduanya menunjukkan semangat dan komitmen yang serius dan teguh, walau banyak upaya menghambat. Misalnya lewat kampanye negatif terkait politik dinasti,”.

Berita dari kedua media *online* tersebut memperlihatkan bagaimana media mengkonstruksi realitas dan menggiring opini bahwa yang disampaikan adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Padahal sejatinya realitas sosial merupakan buatan manusia dan ditafsirkan lagi oleh manusia. Jadi, konstruksi manusia akan sangat dipengaruhi oleh media yang dikonsumsi. Sedangkan media sangat sulit untuk menyajikan berita sesuai dengan realitas obyektif (Karman, 2015).

Narasumber dan pembingkai berita yang dilakukan kedua media *online* tersebut bukan merupakan representasi dari realitas, namun merupakan pilihan wartawan, pengelola maupun pemilik media, dimana fakta, narasumber, dan peristiwa yang dinarasikan merupakan sebuah realitas yang dikonstruksi. Isi pemberitaan bukanlah suatu barang netral tanpa tujuan atau tanpa maksud ketika dihadirkan di ruang publik. Selalu ada kepentingan media, terhadap isi atau pemberitaan media. Kepentingan ekonomi atau kepentingan politik pemilik dan pengelola media, selalu menjadi kekuatan yang mengatur bagaimana isi media harus ditampilkan, bagaimana realitas harus dikonstruksi atau bagaimana sebuah framing harus dilakukan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik framing pemberitaan tentang politik dinasti pada Pilkada 2020 di Indonesia di media online kompas.com dan okezone.com dapat dipaparkan sebagai berikut dengan menggunakan Analisa framing Model Robert N. Entman:

1. *Define Problems* (definisi Masalah),

Pada media online kompas.com menyebutkan bahwa Politik Indonesia akan tetap sama, atau bahkan memburuk karena dinasti dan nepotisme akan menjadi normal baru. Para kritikus kini mempertanyakan apakah Jokowi sedang mencoba membangun dinasti politiknya sendiri. Sementara itu, dinasti politik adalah sebuah gagasan yang ingin Jokowi hindari dengan menjauhkan diri dari ambisi politik putra dan menantunya, melalui penyangkalan klaim apa pun tentang dinasti politik keluarganya itu. Sedangkan okezone.com lebih menonjolkan sikap pro sesuai pernyataan dari narasumber, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam pernyataan tertulisnya mengatakan kemenangan kedua calon PDI-Perjuangan itu merupakan bagian dari komitmen Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk memastikan partai pimpinannya menghasilkan kepemimpinan muda berkualitas.

2. *Diagnose Cause* (perkiraan masalah dari sumber masalah), merupakan pada framing pemberitaan tentang politik dinasti pada Pilkada 2020 di Indonesia, kompas.com menyatakan bahwa aktor dari pemberitaan tersebut adalah Abdil Mughis Mudhoffir, seorang peneliti post-doktoral di Institut Asia Universitas Melbourne. Sedangkan okezone.com menyatakan bahwa aktor dari pemberitaan tersebut adalah Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

3. *Make Moral Judgement* (pembuatan keputusan moral),

Pada pendefinisian masalah tentang politik dinasti pada Pilkada 2020 di Indonesia. Kompas.com menekankan bahwa Politik Indonesia akan tetap sama, atau bahkan memburuk karena dinasti dan nepotisme akan menjadi normal baru. Penilaian moral pada okezone.com bahwa tidak mempermasalahkan terkait dengan isu politik dinasti yang merupakan kampanye negatif. Komitmen untuk menghasilkan kepemimpinan muda yang berkualitas.

4. *Treatment Recommendation* (penyelesaian masalah),

Kompas.com menyebutkan bahwa salah satu solusi dari isu dinasti politik pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) harus ada aturan ataupun undang-undang yang mengatur tentang dinasti politik tersebut, sehingga tidak ada lagi isu tentang dinasti politik di Indonesia ini. Kemudian dari Partai Politik juga harus

adanya reformasi internal seperti memberikan kesempatan para kader partai yang memang sudah berpengalaman. Okezone.com mengedepankan kepemimpinan muda berkualitas dan menganggap isu politik dinasti pada Pilkada Tahun 2020 merupakan kampanye negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim Bathoro, (2011). Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal FISIP UMRAH* Vol. 2, No. 2, 2011 : 115 t 125.
- Anggoro, A. D. (2014). Media, Politik dan Kekuasaan (Analisis Framing Model Robert N. Entman tentang pemberitaan hasil pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 di TV One dan Metro TV). *ARISTO*, 2(2), 25–52.
<https://doi.org/10.24269/ars.v2i2.16>
- Ardianto, Elvinaro, (2016). Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Berger, T., & Lucman, P. (1996). *The social Of Construction of Reality: A TreatiseInn The Sosiology Of Knowledge*. United State. Anchor Books.
- Budiyono, (2016). Politik Dinasti dalam Pemberitaan Media (Analisis Framing Isu Politik Dinasti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Pada Harian Kompas dan Koran Tempo). *Jurnal IPTEK-KOM*, Vol. 18 No. 2, Desember 2016: 160-173 ISSN 2527-4902.
- Eriyanto, (2011). “Analisis Framing”: Konstruksi Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta: Lkis.
- Hamdi, A.S. & Baharuddin, E. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta, CV Budi Utama.
- Herman, M., & Uhaib, M. (2016). Local Elections, Local Actors And Political Patronage Networks (Understanding Involvement Of Coal Mining Bosses In The Local Elections In South Kalimantan Province, 228–247.
- Karman. (2015). *Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoritis Terhadap Konstruksi Realitas Peter L Berger):. Vol, 5 No.* *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*.
- Krisyantono, rachmat (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertasi contoh praktis riset media, public relations, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran*, Edisi 1. Jakarta: kencana pranada media group
- Merry Fridha Tri Palupi, Rahmat Edi Irawan (2020). Analisis Framing Pemberitaan Kebijakan Pemerintah Terkait Ketenagakerjaan sebagai Dampak Covid 19 di Kompas.com dan Malaysiakini. *Jurnal Representamen* Vol 6 No. 02 Oktober 2020.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, M. (2013). *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya*. *Jurnal*

- Studi Komunikasi dan Media*, 15(1), 128.
<https://doi.org/10.31445/jskm.201.150106>
- Pratiwi, A. (2018). Konstruksi Realitas Dan Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan LGBT Di Republika Dan BBC News Model Robert N. Entman). *THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam*, 19(1), 50–71.
- Sadono, T. P., & Fensi, F. (2015). Pemberitaan Bergabungnya Hary Tanoesoedibjo Ke Partai Hanura (Analisis Ekonomi Politik Media Dalam Framing Portal Online Okezone.com dan Metrotvnews.com). *Jurnal Bricolage.*, 01(01), 1–28.
- Winarni, N., & Lestari, R. D. (2019). Netizen News Sources in the Journalistic Ethics Perspective (Case Study in Online Media *Jogja.tribunnews.com*). *Journal Pekommas*, 4(1), 85.
<https://doi.org/10.30818/jpkm.2019.2040109>.
- Zahrotus Sa'idah, (2019). PREFERENSI KESALEHAN WANITA DALAM FILM RELIGI (STUDI ANALISA FRAMING TERHADAP FILM KHALIFAH KARYA NURMAN HAKIM). *Jurnal Representamen Vol 5 No. 02 Oktober 2019*.
- Sumber Internet**
- [https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/02/eJournal%20Iimu%20Komunikasi%20Rizal%20new%20\(02-20-15-02-05-55\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/02/eJournal%20Iimu%20Komunikasi%20Rizal%20new%20(02-20-15-02-05-55).pdf)
- <https://media.neliti.com/media/publications/228099-politik-dinasti-dalam-pemberitaan-media-0fc99f19.pdf>
- <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/iptekkom/article/view/771>
kpu.go.id Diakses pada 3 Januari 2021
- bawaslu-babelprov.go.id Diakses pada 3 Januari 2021
- Laura Christina Luzar, “Teori Kontruksi Realitas Sosial”, Binus University School Of Design,
<https://dkv.binus.ac.id/2015/05/18/teori-konstruksi-realitas-sosial/>, 18 Mei 2015 diakses tanggal 12 Januari 2021.
- <https://www.kompas.com/global/read/2020/12/09/214234870/pilkada-2020-di-mata-media-asing-dinasti-politik-jokowi-jadi-sorotan?page=all> Diakses pada 3 Januari 2021
- <https://www.tribunnewswiki.com/2020/12/11/media-asing-soroti-dinasti-politik-jokowi-di-pilkada-2020> Diakses pada 3 Januari 2021
- <https://nasional.okezone.com/read/2020/12/11/37/2325585/pandemi-golput-dan-dinasti-politik-baru-warnai-pilkada-2020> Diakses pada 12 Januari 2021
- <https://www.suara.com/news/2020/12/16/054319/kuatnya-politik-dinasti-di-pilkada-2020-justru-merusak-parpol-itu-sendiri?page=all> Diakses pada 12 Januari 2021
- <https://katadata.co.id/0/analisisdata/5fd3653b92a95/jejaring-dinasti-politik-di-pilkada-2020> Diakses pada 12 Januari 2021
- <https://www.antaranews.com/berita/1648526/menjelang-pilkada-keluarga-2020> Diakses pada 12 Januari 2021
- https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%203%202017_UPLOAD.pdf Diakses pada 12 Januari 2021